



STIA LAN MAKASSAR

Jurnal Administrasi Negara, Volume 21 Nomor 1, April 2015 / 6 - 15

Jurnal
Administrasi Negara

MENGAKSELERASI GERAKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA

ACCELERATING DEVELOPMENT MOVEMENT IN PAPUA PROVINCE

Johann Tarru Mada

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II,
Lembaga Administrasi Negara, Makassar.
e-mail: jtmada@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Daerah seharusnya memiliki Pernyataan visi dan misi yang menjadi tonggak kesepahaman bersama semua pelaku pembangunan untuk menyamakan gerak langkah guna mengaktualisasikan segenap potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten dan kota menuju cita-cita sejati pembangunan, yaitu menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memetakan potensi perekonomian dan membandingkannya dengan pernyataan visi dan misi kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kemampuan akselerasi pembangunan di setiap kabupaten/kota. Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu sebanyak 28 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan *area cluster sampling*, dipilih 3 kabupaten di bagian utara, 4 kabupaten/kota di bagian tengah, dan 3 kabupaten di bagian selatan Provinsi Papua. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Tipologi Klassen, yang memetakan sektor ke dalam 4 kuadran. Kemudian membandingkannya dengan pernyataan visi dan misi masing-masing kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki perbedaan karakteristik sektor unggulannya. Terdapat dua sub sektor yang unggul di hampir semua daerah, yaitu: perikanan dan kehutanan. Secara kumulatif terdapat 86 sub sektor unggulan yang dimiliki oleh semua kabupaten/kota, namun hanya 34 sub sektor yang tersirat secara jelas dalam pernyataan visi dan misi masing-masing kabupaten dan kota.

Kata kunci: visi, misi, tipologi klassen, keunggulan regional, keunggulan absolut, keunggulan komparatif.

Abstract

Regional Government should have vision and mission statements as milestones of agreement with all the actors of development to equalize motion steps in order to actualize all the potential of each of regency and city to reach the ideals of development, i.e. to make more prosperous and dignified society. This research is to chart the potential economy and compare it with the vision and mission statement of regencies and cities in Papua Province, in order to obtain general overview on the ability of accelerating development in each of regency and city. This is a descriptive research. The population of this research is all regency/city in Papua Province, they are, 28 regencies and 1 city. Based on Area Cluster Sampling, 3 (three) regencies in the northern part, 4 (four)

regencies/city in the center, and 3 (three) regencies in the southern part of Papua Province were chosen. Data is analysed by using the *Klassen Typology Model*, who mapped the sector into 4 quadrants. Then, compare it with their vision and mission statements of each of regency and city. The results show that each of regency/city has distinctive characteristics in advantage sector. There are 2 sub sectors of excellence exist in all regencies and city, namely fishery and forestry. Cumulatively, there are 86 sub sector flagships that are owned by all districts/cities, but only 34 sub sectors clearly imply the vision and mission statements in each of regency and city.

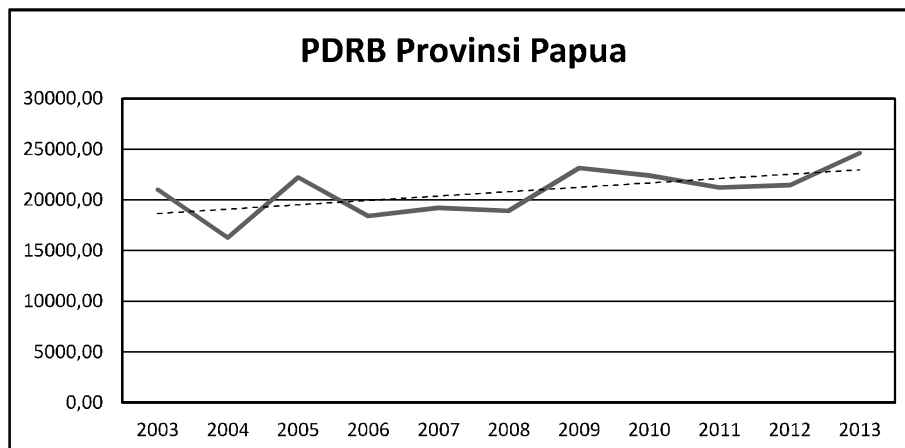
Keywords: vision, mission, *klassen typology*, regional advantages, absolute advantage, comparative advantage

PENDAHULUAN

Produk domestik regional bruto Provinsi Papua dari tahun 2003 hingga 2013, tampak memiliki kecenderungan meningkat yang relatif landai, walaupun terdapat pergerakan naik dan turun dari tahun ke tahun. PDRB tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar Rp 24,616 Triliun sedangkan terendah pada tahun 2004 sebesar Rp 16,282 Triliun, dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 2,93% per tahun. Rata-rata tersebut tentunya masih jauh di bawah rata pertumbuhan PDRB nasional periode yang sama yakni sebesar 5,61%. Berdasarkan data BPS tahun 2008, pendapatan perkapita Provinsi Papua merupakan peringkat keempat nasional, di bawah Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau, dan Kepulauan Riau.

Realita di lapangan memperlihatkan pendapatan perkapita yang tinggi ini ternyata tidak serta merta mampu menghadirkan kelas masyarakat yang mapan secara ekonomi. Indikator jumlah penduduk miskin dan indikator indeks pembangunan manusia memperlihatkan kondisi masih rendahnya kesejahteraan masyarakat secara umum di Provinsi Papua. Tampak pada tabel 1, persentase penduduk kategori miskin pada provinsi ini sebesar 30,05% sangat besar jika dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional yang hanya sebesar 11,25%. Secara khusus, pada sebaran penduduk miskin, terlihat komposisi penduduk miskin di desa sangat ekstrim persentasenya yaitu 36,16% jika dibandingkan dengan penduduk di kota yang besarnya hanya 4,47%. Data yang memberikan informasi yang penting betapa pembangunan di Provinsi Papua

Grafik 1 : PDRB Provinsi Papua Menurut Harga Berlaku Tahun 2000, (2003–2013)



Sumber: BPS, diolah.

belum terlalu menyentuh masyarakat desa yang mendiami wilayah-wilayah pedalaman.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi,
Maret 2014

Propinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
Papua	4.47	38.92	30.05
Papua Barat	5.86	36.16	27.13
Indonesia	8.34	14.17	11.25

Sumber: BPS.

Pada tabel 2, indikator indeks pembangunan manusia Provinsi Papua menunjukkan nilai yang relatif rendah yaitu sebesar 66,25 dibandingkan nilai rata-rata IPM Indonesia sebesar 73,81. Jika besaran IPM ini diranking berdasarkan provinsi, maka pada tahun 2013, Provinsi Papua memiliki IPM yang paling rendah. Dengan menjadikan salah satu indikator IPM yaitu indikator hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan, sebagai dasar berpikir. Maka tergambar tingkat pendapatan perkapita yang tinggi di masyarakat Papua tidak mampu mengimbangi pengeluaran riil perkapitanya. Kemiskinan yang melanda disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat.

Tabel 2: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi

Propinsi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
PAPUA BARAT	68.58	69.15	69.65	70.22	70.62
PAPUA	64.53	64.94	65.36	65.86	66.25
INDONESIA	71.76	72.27	72.77	73.29	73.81

Sumber: BPS.

Mengapa sebuah provinsi yang berlimpah sumber daya dan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi belum mampu memberikan kesejahteraan yang baik bagi masyarakatnya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dan dicarikan solusi yang tidak hanya bersifat temporer jangka pendek namun harus bersifat "sustainable" dan mengakar sesuai dengan potensi lokal setempat. Pembangunan ekonomi yang bersifat *sustainable* hanya dapat diraih dengan menekankan 3 hal utama yaitu, *pro poor*,

pro job, dan *pro growth*. Artinya pembangunan haruslah fokus pada pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru serta manfaatnya dapat dirasakan oleh segenap masyarakat atau dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi haruslah menyentuh dengan baik ke seluruh masyarakat. Pembangunan yang menghargai potensi lokal, mengartikan pembangunan haruslah diarahkan untuk memberdayakan masyarakat setempat, menghargai lingkungan dan kearifan lokal yang hidup.

Pembangunan yang menggerakkan semua masyarakat, seyogyanya menyentuh 3 hal inti, yaitu: 1. *Sustenance*/kecukupan (kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan); 2. *Self esteem*/harga diri (pembangunan haruslah memanusiakan orang, meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada

di tempat itu); dan 3. *Freedom*/kebebasan (dalam hal berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi

dalam pembangunan). Ketiga hal ini terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling dasar serta terwujud dalam berbagai manifestasi di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman (Todaro, 2002).

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud memaparkan karakteristik dan keterkaitan dari beberapa indikator

perekonomian dalam suatu daerah serta membandingkannya dengan misi dan visi pemerintah daerah. Data perekonomian yang dimaksud adalah pertumbuhan PDRB kabupaten/kota, rata-rata pertumbuhan PDRB provinsi acuan (Provinsi Papua), kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten/kota, dan rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB provinsi acuan (Provinsi Papua) serta visi dan misi kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, jumlah populasi sebanyak 29 kabupaten/kota. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *area cluster sampling*. Berdasarkan metode tersebut, sampel dipilih berdasarkan lokasi wilayah, yaitu:

- a. 3 kabupaten yang berada di bagian utara: Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi.
- b. 4 kabupaten/kota yang berada di bagian tengah: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
- c. 3 kabupaten yang berada di bagian selatan: Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Bovendigoel.

Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif yakni dengan melakukan komparasi data yang ada pada kabupaten/kota dengan data daerah acuan, dalam hal ini nilai rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Papua. Terdapat 4 indikator ekonomi yang digunakan, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDRB kabupaten/kota, (g_i)
- b. Rata-rata pertumbuhan PDRB provinsi acuan, (g)
- c. Kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten/kota, (ms_i) dan

- d. Rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB provinsi acuan, (ms)

Pemetaan sub sektor dilakukan dengan mengikuti kaidah sebagai berikut:

- a. Kuadran 1 apabila :
 $g_i > g$ dan $ms_i > ms$
- b. Kuadran 2 apabila :
 $g_i < g$ dan $ms_i > ms$
- c. Kuadran 3 apabila :
 $g_i > g$ dan $ms_i < ms$
- d. Kuadran 4 apabila :
 $g_i < g$ dan $ms_i < ms$

Setelah memetakan sektor dan sub sektor ke dalam kuadran, kemudian membandingkan keunggulan sektor dan sub sektor dengan substansi yang ada didalam misi dan visi setiap kabupaten/kota dan provinsi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh data pertumbuhan masing-masing sub sektor pada tingkat Provinsi. Pada sektor pertanian, terlihat sub sektor tanaman perkebunan memperlihatkan rata-rata pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 7,72% setiap tahunnya diikuti oleh sub sektor peternakan sebesar 6,61% per tahun. Pada sektor pengolahan, sub sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi yakni sebesar 9,0% sedangkan sub sektor industri besar dan sedang relatif rendah yaitu sebesar 3,79% per tahun.

Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, masing-masing sub sektor menunjukkan pertumbuhan yang relatif sama yaitu kisaran 10%, hanya saja sub sektor perdagangan yang memiliki pertumbuhan yang tertinggi yaitu sebesar 11,37%. Pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sub sektor komunikasi yang memperlihatkan pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu

sebesar 18,74%. Kemudian diikuti oleh sub sektor angkutan udara, jasa penunjang angkutan, dan angkutan jalan raya, masing-masing sebesar 12,05%, 11,39%, dan 10,55%. Angkutan laut dan angkutan sungai merupakan sub sektor yang memiliki pertumbuhan yang rendah di sektor ini, masing-masing sebesar 9,43% dan 6,08%.

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sub sektor perbankan memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi yakni sebesar 33,41%. Pertumbuhan ini merupakan angka yang tertinggi dari semua sub sektor yang ada. Setelah itu diikuti oleh sub sektor non bank, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 13,76%, 13,30%, dan 11,48%. Pada sektor jasa, tampak sub sektor jasa pemerintahan yang menduduki

pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 13,77%, diikuti sub sektor jasa rumah tangga, jasa social kemasyarakatan, dan jasa hiburan/rekreasi yakni 10,80%, 10,21%, dan 8,74%.

Data sebaran penguasaan pasar, *market share*, untuk setiap sub sektor secara umum terlihat merata. Hanya ada beberapa sub sektor yang memiliki kontribusi relatif banyak terhadap produk domestik regional bruto, lebih dari 5%, di Provinsi Papua, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, perdagangan, dan pemerintahan umum masing-masing sebesar 8,91%, 6,85%, dan 9,27%.

Berdasarkan pengolahan data (lihat tabel 3) diperoleh sub sektor unggulan yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. Terdapat 45 sub sektor

Tabel 3: Peta Kuadran Sub Sektor Setiap Kabupaten/Kota

	Sopiori	Biak Numfor	Sarmi	Jayawijaya	Miriika	Jayapura	RE.Jayapura	Merauke	Mappi	Boven Digoel
PERTANIAN										
1. Tanaman Bahan Makanan	4	3	2	2	4	1	4	1	★	4
2. Tanaman Perkebunan	2	3	★	2	4	1	4	2	4	1
3. Peternakan dan Hasilnya	1	2	3	2	3	1	4	1	★	4
4. Kehutanan	1	3	2	3	4	1	3	2	2	2
5. Perikanan	1	1	★	1	3	3	1	2	1	★
INDUSTRI PENGOLAHAN										
1. Industri Besar/Sedang	4	2	2	4	4	1	★	2	1	★
2. Industri Kecil Kerajinan RT	2	2	3	4	3	★	1	★	1	★
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN										
1. Perdagangan	2	2	2	2	3	2	2	1	★	3
2. Hotel	4	2	4	4	4	3	★	1	★	3
3. Restoran	4	2	2	2	3	2	2	1	★	3
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI										
1. Angkutan Jalan Raya	2	2	3	4	3	3	2	2	4	4
2. Angkutan Laut	2	3	★	3	4	4	1	2	4	4
3. Angkutan Sungai	2	3	★	4	4	4	3	4	2	1
4. Angkutan Udara	4	2	3	1	4	2	4	3	1	4
5. Jasa Penunjang Angkutan	4	2	4	4	3	2	1	2	2	4
6. Komunikasi	4	4	2	1	3	2	2	4	4	4
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN										
1. Bank	4	2	2	1	3	★	1	★	1	★
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	2	4	4	3	★	3	★	1	★
3. Sewa Bangunan	2	2	2	4	4	2	1	★	4	2
4. Jasa Perusahaan	4	2	4	4	3	★	3	★	1	★
JASA-JASA										
1. Pemerintahan Umum	3	★	2	3	★	2	4	2	2	2
2. Jasa Sosial Kemasyarakatan	2	2	3	4	3	★	4	1	★	4
3. Jasa Hiburan dan Rekreasi	4	2	4	4	4	3	★	1	★	3
4. Jasa perorangan dan RT	2	2	4	4	4	4	1	★	3	4
Jumlah Sub Sektor pd Kuadran 1	3	3	2	3	0	7	12	9	4	2
Jumlah Sub Sektor pd Kuadran 3	1	3	6	2	11	7	1	3	3	4
TOTAL	4	6	0	5	11	14	13	12	7	6
Keterangan:	★ : Tercantum secara jelas dalam pernyataan visi dan misi kab/kota									

Sumber: Data Olahan, 2015

yang masuk dalam kategori *absolut advantage* dan 41 sub sektor yang masuk dalam kategori *comparative advantage*. Jadi total terdapat 86 sub sektor unggulan. Setelah mempelajari pernyataan visi dan misi masing-masing kabupaten/kota diperoleh hanya 34 sub sektor yang tersirat secara jelas dalam pernyataan misi dan visi pada masing-masing kabupaten dan kota.

Kabupaten Supiori tampak memiliki keunggulan di sektor pertanian. Terlihat sub sektor peternakan, kehutanan, dan perikanan pada daerah ini dalam kondisi maju dan tumbuh dengan pesat. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini ada baiknya berkonsentrasi pada ketiga sub sektor tersebut yang nantinya akan menggairahkan perekonomian sub sektor yang lainnya. Selain itu sub sektor pemerintahan juga merupakan sub sektor unggulannya. Hanya saja dalam Visi dan Misi (2010-2015) kabupaten ini hanya menjelaskan secara eksplisit peran penting pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Supiori yang sejahtera. Sedangkan pengembangan potensi ekonomi dari sektor unggulan tidak disebutkan dengan tegas.

Pada Kabupaten Biak Numfor, sektor pertanian memiliki keunggulan daya saing yang tinggi. Tampak pada sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, dan juga perikanan yang berada pada kuadran 3 dan 1. Selain itu kabupaten ini juga ditunjang dengan memiliki keunggulan yang baik di angkutan laut dan sungai. Dalam visi dan misinya (2014-2019), terlihat kabupaten ini ingin menjadi kota jasa dengan dukungan sub sektor unggulannya yaitu perikanan, perkebunan, dan transportasi.

Kabupaten Sarmi memiliki keunggulan di sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan dan perikanan. Daerah ini juga memiliki daya saing di sub sektor angkutan jalan raya, laut, dan udara. Selain itu kabupaten ini

memiliki beberapa keunggulan lainnya, yaitu pada sub sektor industri pengolahan skala kecil dan pada sektor jasa. Pada pernyataan visi dan misinya di antara beragam sektor unggulan yang dimiliki, Kabupaten Sarmi hanya mencantumkan tujuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.

Kabupaten Jayawijaya, memiliki keunggulan pada sektor pertanian khususnya pada sub sektor kehutanan dan perikanan. Selain itu juga memiliki keunggulan pada sub sektor angkutan udara dan komunikasi. Daerah ini juga mempunyai sub sektor yang maju dan tumbuh pesat, yaitu sub sektor perbankan. Pernyataan visi dan misi (2008-2013) terlihat tidak menyebutkan satupun dengan tegas sektor unggulan yang dimiliki.

Kabupaten Mimika terlihat relatif lebih memiliki potensi ekonomi dibanding Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terlihat dari lebih banyak/variatifnya sektor yang memiliki daya saing di daerah ini. Daerah ini memiliki 11 sub sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi pada kabupaten ini, yaitu: sektor pertanian memiliki keunggulan khususnya pada sub sektor peternakan dan perikanan; sub sektor industri pengolahan kecil; sub sektor perdagangan; sub sektor angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, dan komunikasi; sub sektor bank, non bank, dan jasa perusahaan; sub sektor jasa sosial kemasyarakatan. Membaca visi dan misi (2008-2013) kabupaten ini, terlihat dengan jelas dan tegas bahwa sektor jasa dan industri akan menjadi tumpuan utama dalam mengembangkan potensi daerah guna menciptakan daya saing global.

Kabupaten Jayapura, merupakan daerah yang memiliki paling banyak sektor unggulan dibanding daerah lain di Provinsi Papua yang menjadi sampel pada penelitian ini. Tercatat terdapat 7

sub sektor yang memiliki keunggulan absolut dan 7 yang memiliki keunggulan komparatif. Semua sub sektor pada sektor pertanian dan industri pengolahan memiliki keunggulan. Selain itu, daerah ini juga ditopang dengan keunggulan di sub sektor perbankan, lembaga keuangan non perbankan, dan jasa perusahaan. Juga keunggulan di sub sektor perhotelan, jasa angkutan jalan darat dan sungai, serta hiburan. Hal ini memperlihatkan kesiapan kabupaten ini untuk semakin maju untuk tumbuh dan memberikan dampak pembangunan ekonomi kepada kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Pernyataan visi dan misi (2012-2017) kabupaten ini, tergambar dengan jelas tekad untuk mendorong ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, dan industri yang ditopang oleh sistem transportasi yang handal.

Kota Jayapura, satu-satunya daerah kota otonom di Provinsi Papua. Daerah ini relatif maju dibanding beberapa daerah di provinsi ini. Terlihat memiliki 12 sub sektor yang memiliki keunggulan absolut dan 1 sub sektor dengan keunggulan komparatif. Dengan memiliki 12 sub sektor yang maju dan sedang tumbuh pesat, menunjukkan kota ini memang merupakan barometer ekonomi bagi Provinsi Papua. Sebagai ibukota provinsi, Kota Jayapura merepresentasikan sebagai sebuah kota jasa, yang ditopang dengan keberadaan sub sektor angkutan laut dan perhotelan serta keberadaan industri pengolahan skala kecil. Dalam pernyataan visi dan misi (2011-2016) kabupaten ini, salah satu yang ingin dicapai yaitu menjadi kota jasa dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Berada pada bagian selatan Provinsi Papua, Kabupaten Merauke juga dapat dikategorikan sebagai daerah yang relatif maju dengan memiliki 9 sub sektor dengan keunggulan absolut serta 3 sub sektor dengan keunggulan komparatif.

Tampak terlihat keunggulan kabupaten ini pada sektor industri pengolahan yang ditopang dengan adanya keunggulan di sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan. Keunggulan ini sejalan dengan majunya perkembangan sektor bank, dan lembaga keuangan non bank yang ada pada daerah ini serta kemajuan di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa hiburan serta adanya keunggulan di sektor angkutan udara. Pada pernyataan visi dan misinya (2011-2016), kabupaten ini sangat jelas dan tegas ingin menjadi gerbang pangan nasional. Selain itu juga tersirat dengan jelas keinginan untuk mengembangkan dan menata zona perdagangan dan industri serta menggalakkan perekonomian kampung khususnya di sub sektor peternakan.

Kabupaten Bovendigoel dan Kabupaten Mappi, memiliki jumlah keunggulan yang hampir sama, yaitu 6 dan 7. Keduanya memiliki keunggulan pada sub sektor perdagangan, angkutan sungai, dan perbankan. Hanya saja pada Kabupaten Bovendigoel terdapat keunggulan pada sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Pernyataan visi dan misi (2012-2017) Kabupaten Mappi hanya menyinggung satu potensi sektor unggulannya yaitu sub sektor perikanan. Sedangkan pernyataan visi dan misi (2010-2015) Kabupaten Bovendigoel tidak menyebut secara eksplisit satupun dari sektor unggulan yang dimilikinya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olahan yang tampak pada tabel 3, tampak secara umum bahwa masing-masing kabupaten tersebut memiliki keunggulan di sektor yang berbeda. Jika menggunakan teori keunggulan absolut, *absolute advantage*, maka setiap daerah hanya akan fokus pada keunggulan absolutnya yaitu pada kuadran 1. Apabila menggunakan teori keunggulan komparatif, *comparative advantage*, maka setiap daerah juga seharusnya fokus pada sub sektor yang

sedang memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, yaitu sub sektor yang berada pada kuadran 3.

Suatu kabupaten/kota harus dapat memetakan sektor –sektor yang strategis, sehingga dapat tercipta optimalisasi sumber daya daerah yang bersifat terbatas. Di dalam kumpulan sektor yang dimiliki daerah terdapat “jagoan masa lalu” dan “pemenang masa depan”. Oleh karenanya diperlukan suatu alat analisis untuk memilah sektor-sektor tersebut sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu model evaluasi portofolio bisnis yang terkenal, yaitu model Boston Consulting Group, (Kotler, 2003).

Sejalan dengan model Boston Consulting Group yang memetakan sebuah unit-unit bisnis sebuah portofolio bisnis, dalam dunia pemetaan potensi ekonomi daerah dikenal adanya tipologi klassen. Tipologi ini pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah, (www.bi.go.id). Hanya saja pada penelitian ini mencoba memetakan sektor yang ada pada perekonomian suatu daerah sehingga indikator yang digunakan adalah pertumbuhan sektor dan *market share* sektor tersebut di kabupaten/kota tertentu kemudian membandingkannya dengan data rata-rata indikator yang sama pada level provinsi. Pemetaan sektor kemudian dilakukan dengan menempatkan masing-masing sektor ke dalam 4 kuadran, yaitu:

- a. Kuadran 1 : Sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh.
- b. Kuadran 2 : Sektor yang cepat maju namun tertekan.
- c. Kuadran 3 : Sektor yang cepat tumbuh namun belum maju.
- d. Kuadran 4 : Sektor yang tertekan dan belum maju.

Menurut Adam Smith, perdagangan akan meningkatkan kemakmuran masyarakat apabila dilakukan melalui

system perdagangan bebas. Melalui sistem ini para pelaku ekonomi diarahkan untuk melakukan spesialisasi dalam rangka peningkatan efisiensi. Spesialisasi ini didasarkan pada sektor yang memiliki keunggulan absolut / *absolute advantage*. Hanya saja menurut David Ricardo, transaksi ekonomi yang dilakukan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat dapat pula dilakukan berdasarkan keunggulan komparatif / *comparative advantage* yang dimiliki oleh masing-masing Negara yang bermitra, (Rahardja, 2008). Walaupun kedua teori ini lahir dalam konteks perdagangan internasional, namun pada penelitian ini mencoba diadaptasikan untuk melihat potensi sektor ekonomi di masing-masing kabupaten kota.

Visi bersama menggambarkan suatu daya dalam hati setiap individu yang memiliki kekuatan yang mengagumkan. Awalnya bisa saja diinisiasi oleh suatu ide namun kemudian berkembang dan didukung oleh semua pihak. Sehingga visi ini bukanlah sesuatu yang abstrak namun dapat diraba, orang-orang mulai melihatnya dan seolah-olah menjadi sebuah kenyataan. Inilah yang kemudian visi dirumuskan sebagai gambaran kondisi masa depan yang hendak diwujudkan. Suatu visi bersama akan bernilai bermanfaat apabila semua anggota organisasi memiliki gambaran yang sama dan mempunyai komitmen satu sama lain untuk memilikinya, bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, mereka terhubung dan terikat satu sama lain. Visi bersama memaksa keberanian keluar dengan sangat alaminya sehingga kadang orang tidak menyadari seberapa jauh keberanian mereka dalam mengejar visi (Senge, 1996).

Di era sekarang, dimana Ford, Apple, dan AT&T menikmati keberhasilannya merupakan bukti hadirnya visi bersama yang hadir di relung hati dan kepala para pendirinya (Henry Ford, Steven Jobs, dan Theodore Vail). Begitu pula berbagai

perusahaan raksasa dunia yang mulai usahanya dengan visi yang tangguh, sebutlah Canon, Samsung, Sony, Honda, General Electrics, Xerox, Hyundai, Unilever. Sebuah penelitian terhadap 25 alat bantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja, seperti: survai pelanggan, manajemen mutu total, rekayasa ulang, merit sistem menunjukkan bahwa para pimpinan perusahaan sepakat bahwa pernyataan misi dan visi melebihi alat apapun juga. Hasil ini juga diperkuat oleh Survei yang dilakukan oleh Bain & Company pada 1994. Ternyata pernyataan misi dan visi mampu dengan cepat memberi keputusan apa yang harus diambil untuk menangani suatu permasalahan. Pernyataan visi dan misi bukan hanya hadir sekedarnya, tetapi merupakan gagasan yang harus dipikirkan dengan seksama yang pada akhirnya akan membantu organisasi memenuhi bahkan melampaui impian keuangan mereka, memperlakukan karyawan dengan baik, membebaskan diri dari krisis dan sebagai peta jalan untuk menggapai cita-cita (Jones, 1999).

Dalam perjalanan menuju masa depan organisasi membutuhkan peta untuk menjadikan perjalanannya efektif dan untuk mengelola energi organisasi secara efisien dan efektif ke tujuan perjalanan yang telah ditetapkan. Peta inilah yang dinamakan misi dan visi. Hal inilah yang mendasari organisasi dibangun menjadi *mission and strategy focused, vision directed, philosophy driven*. Organisasi sangat menyadari di era yang penuh dengan ketidakpastian dimana perubahan-perubahan besar akan semakin radikal, semakin pesat, semakin serentak, semakin pervasive, dan semakin sering terjadi serta kepemilikan sumber daya yang terbatas dibutuhkan sebuah pendekatan yang mampu menyelesaikan akar setiap masalah yang muncul bukan hanya sekedar menyelesaikan gejalanya sehingga kinerja guna mencapai tujuan semakin optimal (Mulyadi, 2007).

Bagi pemerintah daerah suasana hiperkompetisi ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Beban tersebut yaitu mempersiapkan daerah agar kondusif bagi pertumbuhan bisnis, perkembangan investasi, peningkatan daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mampu dengan jelas memetakan jalan yang dipilih untuk melakukan pembangunan. Pemerintah daerah yang memiliki visi yang tajam atau visioner, haruslah memiliki tujuan yang besar (*big*), panjang (*hairy*), dan kuat (*audacious goals*), BHAG, sebagai cara yang kuat untuk memunculkan motivasi pencapaian tujuan. Menurut Walters karakteristik visi yang baik umumnya memiliki 3 ciri, yaitu: 1. Berorientasi ke depan, artinya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diinginkan oleh daerah; 2. Inspiratif, artinya mendorong semua orang untuk menuju impian yang disepakati; 3. Realistis, artinya berupaya mencapai gambaran realistis yang paling optimal selama kurun waktu tertentu (Kuncoro, 2004).

Misi adalah jalan pilihan (*the choses track*) organisasi untuk menuju ke masa depan. Misi merupakan alasan keberadaan (*reason for being*) suatu organisasi. Misi merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar *what business are we in*. Misi seringkali tidak hanya digunakan untuk menjelaskan bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi, namun juga untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan anggota organisasi, contoh: *Enable oil and gas corporations to become more competitive through enhancing the quality of their human capital* (Mulyadi, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Masing-masing Kabupaten dan kota ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, terlihat dari sektor unggulan yang dimiliki relatif berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Potensi yang ada, perikanan dan kehutanan

merupakan sub sektor unggulan yang hampir merata di setiap kabupaten dan kota. Terdapat 86 sub sektor unggulan, namun dalam pernyataan visi dan misi masing-masing kabupaten dan kota diperoleh hanya 34 sub sektor yang tersirat secara jelas tercantum di dalamnya pernyataan misi dan visi pada masing-masing kabupaten dan kota. Oleh karena itu, sebaiknya setiap kabupaten/kota mengelola potensi perikanan dan kehutanan secara bersama-sama guna menciptakan keunggulan regional agar pengelolaannya dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Provinsi dapat mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten/kota membuat industri pengelolaan produk perikanan dan kehutanan dengan skala yang besar sehingga ke depannya dapat dihadirkan sebuah sentra perekonomian untuk sub sektor perikanan dan kehutanan yang memiliki daya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional hingga kebutuhan pasar dunia. Selain itu, berdasarkan potensi yang dimiliki, daerah seyogyanya membangun visi dan misinya sesuai karakteristik dan keunggulan yang dimilikinya sehingga daerah benar-benar memiliki arah strategi pembangunan yang fokus pada keunggulan daya saing tersebut agar roda pembangunan terakselerasi dan menciptakan percepatan menuju pada cita-cita pembangunan.

REFERENSI

- Jones, Patricia dan Larry Kahanner. 1999. *Misi dan Visi: 50 Perusahaan Terkenal di Dunia*. Batam: Interaksara.
- Kotler, Philip. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardja, Pratama, dan Mandala. 2008. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Edisi ke-4. Jakarta: FE-UI.
- Todaro, M.P and Stephen C. Smith. 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-8. Jakarta: Erlangga.
- Senge, Peter. 1996. *Disiplin Kelima*. Edisi ke-1. Jakarta: Binarupa Aksara.